



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUCAHYO**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **20920**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 990.000.000**

1. Tanah Seluas 1041 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 505 m2/200 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/100 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 694 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/190 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 132 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
8. Tanah Seluas 66 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 210.850.000**

1. MOBIL, SUZUKI BALENO SEDAN Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.600.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI



Rp. 100.000.000		
4. MOBIL, VW SAFARI JEEP Tahun 1974, HASIL SENDIRI	Rp.	40.000.000
5. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 1997, HASIL SENDIRI	Rp.	4.500.000
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	10.000.000
7. LAINNYA, RICHEY E-BIKE Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	1.750.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	190.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	629.096.171
F. HARTA LAINNYA	Rp.	98.000.000
Sub Total	Rp.	2.118.146.171
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.118.146.171

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.